

PERILAKU MENYIMPANG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh: Suyato

Jurusan PKnH FISE UNY

Abstract

Discourse of deviant behaviour becomes difficult because of its complexity and relativity. Its complexity stems from the facts that there are many concepts should be considered, namely medical concepts, legal aspects, and morals issues. Its relativity comes from the facts that there are many perspectives, such as cross-cultural perspectives, sub-cultural variations, ecological context, variation over time, and situational aspects. Sociologists have been made explanation on deviant behaviour but not yet comprehensive.

Sociological perspectives on deviant behaviour can be categorized as structural functional theory, symbolic interaction theories, and conflict theory as structural functional theory, symbolic interaction theories, and conflict theory. Each of them tries to explain major question, basic assumption, and causes of deviant by using its own perspective. For example, control theory has been emphasis that because the lack of strong tied (legal or social) from others, individuals tend to conduct defiantly. Sociologists also have been tried to comprehend ways in which people neutralize their own behaviours.

Using economic perspective and control theory to eliminated corruption conducted by apparatus in district development program as an example, this article conclude that it is needed to make a comprehensive perspective in solving deviant behaviour problems, such as corruption.

Kata Kunci: perilaku menyimpang, perspektif sosiologis

Pendahuluan

Pembicaraan tentang penegakan hukum sangat terkait dengan perilaku menyimpang, baik yang dilakukan oleh orang awam, pejabat public, maupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang perilaku menyimpang akan sangat membantu upaya penegakan hokum, khususnya dalam usaha yang bersifat preventif.

Yang menjadi masalah, disamping masalah kompleksitas mengenai perilaku menyimpang dan latar belakangnya, ada nuansa relativitas ketika menentukan mana perilaku yang menyimpang, mana yang bukan. Kompleksitas masa;ah perilaku menyimpang misalnya menyangkut *medical concepts, legal concepts*, dan *moral issues* (Schur, 1979:18-25). Sedangkan relativitas perilaku menyimpang antara lain karena adanya kemungkinan tinjauan dari berbagai aspek atau perspektif, seperti *cross-cultural perspectives, sub-cultural variations, ecological context, variation over time*, dan *situational deviance* (Schur, 1979: 74-96). Sementara itu, Goode mengemukakan bahwa relativitas perilaku menyimpang bisa disebabkan oleh factor *audience, actor*, dan *situational* (Goode, 1984: 14-16).

Tulisan singkat ini akan memaparkan masalah perilaku menyimpang dari perspektif sosiologis dan sebuah contoh aplikasinya dalam upaya mengurangi peluang untuk korupsi dalam

Program Pembangunan Kecamatan di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Dunia, termasuk keterbatasannya.

Pengertian Perilaku Menyimpang

Secara mendasar, paling tidak ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu *absolutist*, *normative*, dan *reactive* (Goode, 1984: 7). Perspektif *absolutist* berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218). Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma masyarakat atau budaya. Perspektif reaktif berpandangan bahwa perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku itu dinilai. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebuah tindakan harus memenuhi syarat (1) diamati atau paling tidak didengar, dan (2) menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Kunci utamanya adalah *concrete social disapproval toward specific action and actors*.

Perspektif *reactive* memiliki beberapa kelemahan (Goode, 1984:9-10):

First: It ignore secret behaviour that would be reacted to as deviance, where it known to the community...

Second: It ignore secret behaviour that would be reacted to as deviance, even where the actor knows that it would be condemned by the community...

Third: It denies the possibility that there is any predictability in the reactive process...

Fourth: It ignores the reality of victimization.

Perilaku menyimpang bisa dilakukan secara individual atau kelompok. Perilaku mengemis yang dilakukan seseorang merupakan penyimpangan individual, tetapi kalau tindakan mengemis itu dilakukan hamper oleh warga satu kampung, maka tindakan itu termasuk tindakan menyimpang secara kelompok atau penyimpangan kelompok.

Perspektif Sosiologis tentang Perilaku Menyimpang

Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya tentang *anomie*, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan social. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan social. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan tidak ada atau tidak mungkin dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau cara

alternative, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Merton menyebutkan ada empat perilaku menyimpang, yaitu inovasi (*innovation*), ritualism (*ritualism*), peneduhan hati (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*).

Yang dimaksud inovasi adalah perilaku seseorang yang menerima atau mengakui tujuan yang selaras dengan budaya atau diinginkan masyarakat. Seorang guru yang tidak puas dengan metode ceramah karena dianggap tidak efektif, mencari alternative lain dalam mengajar, misalnya menggunakan metode *inquiry*, ini termasuk inovasi. Demikian juga, seseorang yang menolak cara-cara wajar, misalnya bekerja keras dan hidup hemat untuk bisa menjadi kaya dan memilih merampok atau melakukan korupsi, maka dalam sosiologi, perilaku ini juga dikategorikan sebagai sebuah inovasi, tetapi dalam arti negative. Masyarakat yang memilih untuk menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri karena beranggapan hukum sudah tidak efektif lagi untuk mencegah kejahatan, maka perilaku ini juga termasuk inovasi.

Ritualisme terjadi manakala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara cultural tetapi menolak atau mengganti tujuan sehingga berbeda dengan harapan semula dari masyarakat atau kelompok. Seorang mahasiswa yang mengikuti upacara atau senam kesegaran jasmani untuk mendapatkan beasiswa, bukan karena untuk menanamkan disiplin dan demi kesehatan, merupakan contoh perilaku ritualisme. Dalam bidang hukum, seseorang yang mengendarai sepeda motor dan memakai helm bukan demi keselamatan tetapi takut mendapatkan 'tilang', merupakan contoh ritualism. Demikain juga seseorang yang melakukan sebuah tindakan tetapi tidak mengetahui tujuan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan tindakan itu, termasuk ritualisme.

Pengasingan diri (*retreatment*) terjadi jika seseorang menolak atau tidak mengakui lagi baik cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya tanpa menggantinya dengan yang baru. Pengasingan diri ini biasanya dilakukan oleh orang yang tertindas tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan atau menentang, sehingga mereka lebih memilih mengasingkan diri. Seorang politisi yang tidak puas dengan kondisi perpolitikan tanah air tetapi tidak mampu untuk melawan arus untuk melakukan perubahan dan lebih memilih untuk tidak terjun ke dunia politik lagi merupakan contoh tindakan pengasingan diri.

Pemberontakan terjadi manakala seseorang menolak baik cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya dengan menggantikannya dengan yang baru. Kudeta adalah contoh perilaku pemberontakan, karena dilakukan atas dasar ketidakcocokan dengan, baik cara maupun tujuan, yang secara umum diperkenankan oleh budaya.

Secara singkat, Brinkerhoff&White (1988:128) merangkum tiga teori utama dalam sosiologi dalam menjelaskan masalah perilaku menyimpang, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

RAGAM TEORI	PERTANYAAN UTAMA	ASUMSI DASAR	PENYEBAB PERILAKU MENYIPANG	SANGAT BERGUNA UTK MENJELASKAN PENYIMPANGAN DARI
Teori structural fungsional	Mengapa orang melanggar aturan?	Perilaku menyimpang merupakan	Adanya dislokasi antara tujuan dan sarana untuk	Kelas pekerja dn kels bawah yang tidak mampu

		karakteristik dari ketidaknormalan struktur sosial	mencapainya dalam masyarakat.	mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara-cara yang dianjurkan.
Teori-teori Interaksionisme Simbolik: Teori asosiasi diferensial.	Mengapa perilaku menyimpang lebih merupakan karakteristik suatu kelompok dibanding yang lain?	Perilaku menyimpang dipelajari, seperti perilaku sosial lainnya.	Nilai-nilai sub-budaya berbeda dalam masyarakat yang kompleks, beberapa sub-budaya menjunjung tinggi nilai-nilai yang mendukung penyimpangan. Ini semua dipelajari melalui sosialisasi.	Kelompok menyimpang (<i>gangs</i>), dan mereka yang tergabung dalam ketetangaan dan sub-budaya menyimpang.
Teori Harga Diri (<i>self-esteem theory</i>)	Mengapa beberapa orang memilih berperilaku menyimpang?	Perilaku menyimpang dilakukan jika peran itu meningkatkan harga diri (<i>self-esteem</i>) pelakunya.	Gagal untuk menghargai perilaku normal (wajar) untuk meningkatkan <i>self-esteem</i> .	Mereka yang gagal dalam peran konvensional.
Teori Pengawasan (<i>Control Theory</i>)	Apa yang mencegah seseorang dari melanggar aturan?	Perilaku menyimpang adalah normal dan konformitas yang harus dijelaskan (mengapa terjadi).	Tidak ada ikatan yang kuat terhadap orang lain dan nilai-nilai serta aktivitas masyarakat.	Individu-individu yang kurang terikat dalam keluarga, ketetangaan, dan masyarakat (khususnya anak muda dari keluarga gagal (<i>broken home</i>)).
Teori Pelabelan (<i>Labelling Theory</i>)	Bagaimana tindakan dan orang mendapatkan label menyimpang?	Penyimpangan adalah relative dan tergantung pada bagaimana orang lain member label terhadap orang dan tindakan itu.	Orang-orang yang memiliki tindakan yang diberi label menyimpang dan orang yang menerima label itu menjadi biasa	Orang-orang yang tidak berdaya yang mendapat label menyimpang oleh individu-individu yang memiliki kekuasaan yang besar.

Teori Konflik (Conflict Theory)	Bagaimana akses yang tidak sama terhadap sumber daya yang terbatas mengarah pada perilaku menyimpang?	Penyimpangan merupakan respon yang normal terhadap kompetisi dan konflik terhadap sumber daya yang terbatas	Ketidakmerataan dan kompetisi	Semua kelas. Kelas bawah didorong untuk berperilaku menyimpang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan untuk keluar dari frustrasi; kelas atas menggunakan perilaku menyimpang untuk mempertahankan hak-hak istimewanya (privilege).
---------------------------------	---	---	-------------------------------	--

Disamping penjelasan tentang perilaku menyimpang, para sosiolog juga telah berhasil memaparkan model 'justifikasi' tentang perilaku menyimpang. Sykes&Matza, sebagaimana dikutip Schaeffer 1989:325), menyatakan bahwa ada lima model justifikasi perilaku menyimpang, yang mereka sebut *techniques of neutralisation*. Kelima model netralisasi itu adalah: *denying responsibility, denying the injury, blaming the victim, condemning the authorities, dan appealing to higher principles or authorities*.

Cara pertama adalah berupa penolakan tanggung jawab. Banyak orang beralasan bahwa karena tekanan yang luar biasa, seperti kemiskinan, ternacam, kurang persiapan secara akademis, membuat mereka berperilaku menyimpang seperti mencuri, membunuh, menyontek dalam ujian. Dalam banyak kasus, seorang pelacur yang terjaring saat razia, sering beralasan karena tekanan ekonomi yang luar biasa beratnya, menyebabkan mereka terjun ke dunia prostitusi.

Cara yang kedua, dengan alasan tidak adanya korban akibat perilaku menyimpang mereka, maka mereka bmenolak kalau perilaku mereka dikategorikan sebagai perilaku criminal atau menyimpang. Para remaja yang melakukan *vandalisme* atau mengecat pakaiannya saat merayakan kelulusannya, para mucikari membuka rumah bordil, anak-anak muda mabuk-mabukan, dan sebagainya sering menggunakan alasan tidak ada korban sebagai justifikasi bahwa perilaku mereka bukan perilaku yang menyimpang atau tindakan criminal.

Cara ketiga, yaitu dengan cara menyalahkan korban sebagai alasan pembenar perilaku menyimpang yang mereka lakukan terhadap korban. Ada pemerkosa dengan santainya mengatakan bahwa mereka memperkosa seorang gadis merasa tidak bersalah bahkan menyalahkan gadis yang diperkosanya karena berpakaian mini sehingga mengundang nafsu syahwat pemerkosa tersebut.

Cara keempat, menyalahkan atau mengalihkan kesalahan kepada pihak yang berwenang atau memiliki otoritas juga sering kita temukan dalam banyak kasus kejahatan atau perilaku menyimpang. Contohnya, "kasihan ya si fulan, hanya karena mencuri seekor ayam, ia harus mendekam di penjara selama tiga bulan, sedangkan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya

sehingga si fulan harus tergusur dari pekerjaannya sebagai pedagang kaki lima dan terpaksa mencuri, tidak tersentuh oleh hukum” adalah salah satu cara untuk menetralisasi atas perilaku menyimpang.

Cara terakhir, dengan mengaitkan prinsip yang lebih tinggi juga sering kita temukan dalam banyak kasus penyimpangan. Banyak Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berdalih untuk membiayai pendidikan anaknya, pencuri kambing yang berdalih untuk membantu sahabat karibnya menikah, tawuran antarremaja atas nama solidaritas, merupakan beberapa contoh cara netralisasi dengan mengaitkan prinsip atau tujuan yang lebih tinggi (mulia).

Sebagai gambaran, bagaimana seseorang bisa berdalih ketika berperilaku menyimpang, perhatikan kutipan jawaban seorang pelacur ketika diwawancarai Bryan berikut ini:

We, girls see, like I guess you call them perverts of some sort, you know, little freaky people and if they didn't have girls to come to like us, that are able to handle them and make it a nice thing, there would be so many rapes and... nutty people really...

I could say that a prostitute has held more marriages together as part of their profession than any divorce counsellor.

I don't regret doing it because I feel I help people a lot of men that come over for companionship, someone to talk to... a lot of them have problems (Schur, 1979: 301).

Aplikasi Teori Kontrol: Kasus Pengawasan Program Pembangunan Kecamatan

Kontrol sosial diartikan sebagai *'the forces and processes that encourage conformity, including self-control, informal control, and formal control'* (Brinkerhoff&White,1989:118). *Self-control* terjadi karena para individu menginternalisasikan nilai-nilai dan norma kelompok mereka. Dukungan yang kuat terhadap *self-control* diberikan oleh control sosial yang bersifat informal. Jika dukungan ini tidak cukup mencegah perilaku menyimpang, control sosial yang bersifat formal akan bekerja. Dengan mendasarkan diri pada teori control, Bank Dunia menggunakan tujuh mekanisme untuk mengurangi peluang korupsi dalam proyek Pembangunan Kecamatan. Secara singkat, ketujuh mekanisme tersebut dapat dikemukakan dalam table berikut:

Mekanisme	Elaborasi
Penyederhanaan dan control masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana ditransfer secara langsung b. Tidak ada control dari pemerintah local c. Warga desa mengontrol anggaran d. Bentuk keuangan disederhanakan sehingga masyarakat desa mudah memahaminya
Sosialisasi	Warga desa belajar bagaimana proyek diharapkan berjalan, apa hak mereka, dan apa yang harus dilakukan jika mereka tidak puas.
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua informasi keuangan dipublikasikan di desa-desa. b. Informasi tentang pengaduan dipublikasikan lewat media massa.
Monopoli terbatas	Minimal tiga pengkuotaan disyaratkan untuk

	semua barang.
Diskresi terbatas	Minimal tiga tanda tangan dibutuhkan untuk semua transaksi keuangan
Mekanisme akuntabilitas	Pertemuan desa secara teratur dilakukan untuk menghitung dana. Pengucuran dana bisa ditunda bila diindikasikan terjadi penyalahgunaan
Monitoring dan tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Program menjamin pengawasan proyek secara teratur, jalur pengaduan, dan tindak lanjut. b. Pengawasan mandiri dilakukan oleh masyarakat sipil dan wartawan.

Dengan mencermati mekanisme yang digunakan Bank Dunia untuk mengurangi peluang melakukan korupsi tersebut di atas, nampak jelas bahwa teori yang digunakan lebih menekankan pada teori control. Sesungguhnya, teori control saja kurang memadai untuk memberantas korupsi. Perspektif lain perlu ditambahkan, misalnya perspektif sosiologi ekonomi, yang akan dijelaskan di bagian bawah ini.

Sebuah Perspektif Sosiologi ekonomi tentang Korupsi

Dalam kehidupan sehari-hari, dalam perspektif sosiologi ekonomi, setiap orang diharuskan untuk selalu mengambil sebuah keputusan atau pilihan. Sebuah pilihan atau keputusan akan dilakukan berdasarkan imbalan atau insentif. Dalam perspektif praktis, insentif itu bisa berupa hadiah atau imbalan keuntungan, hukuman atau kerugian. Akibatnya, sebagaimana teori ekonomi mengatakan, orang akan membandingkan antara *cost and benefits* sebelum keputusan atau tindakan itu dilakukan. Jika keuntungan lebih besar dari kerugian maka seseorang akan cenderung melakukan, demikian juga sebaliknya.

Tindakan korupsi bisa dijelaskan dengan logika tersebut. Sebelum melakukan, orang membandingkan antara keuntungan dan kerugiannya. Kita lihat, misalnya para pelayan public di dalam birokrasi. Sebagaimana diketahui, para pelayan public dalam birokrasi tidak dapat hidup 'layak' dengan penghasilan yang pas-pasan. Keuntungan dengan melakukan korupsi menjadi jelas, yaitu menambah penghasilan. Bagaimana dengan kerugian? Di luar perspektif agama, karena *the rule of law* tidak efektif, sehingga kerugian berupa dipenjara bisa dikesampingkan karena ketidakefektifan hukum, maka orang akan cenderung untuk melakukan korupsi demi menambah penghasilan mereka.

Korupsi memang menjadi cara mudah untuk menambah penghasilan bagi para pelayan public di lingkungan birokrasi. Bagi para pegawai rendah, korupsi menyangkut masalah kelangsungan hidup atau untuk sekadar bertahan hidup. Satu-satunya jalan termudah dan termurah, menurut mereka, adalah dengan melakukan korupsi. Karena mereka tidak memiliki harta benda atau inventaris yang dapat dijual, maka satu-satunya cara adalah melalui pelayanan mereka. Kewenangan mereka dalam melayani public dijadikan jalan untuk korupsi. Akibatnya, orang harus membayar lebih untuk mendapatkan pelayanan dari mereka, misalnya untuk mendapatkan KTP atau SIM.

Korupsi juga terjadi pada pejabat level tinggi di lingkungan birokrasi, yang notabene sudah mendapatkan gaji yang relative tinggi. Bagaimana kita menjelaskan korupsi yang dilakukan pejabat level tinggi di lingkungan birokrasi ini? Skali lagi, teori sosiologi ekonomi bisa menjelaskannya. Teori sosiologi ekonomi menjelaskan bahwa orang memiliki keinginan yang tak terbatas. Bila satu keinginan sudah terpenuhi maka akan muncul keinginan lain, yang bisa jadi lebih besar. Dengkanta lain, ia menginnnginkan barang lebih banyak, uang lebih banyak, dan sebagainya. Jika mereka memiliki peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan resiko yang kecil, maka mereka akan melakukannya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa gaji yang tinggi tidak akan menghalangi orang melakukan korupsi, jika, sekali lagi, hukum tidak ditegakkan, sehingga hamper tidak ada ancaman kerugian bagi pelakunya.

Hal tersebut menjelaskan mengapa begitu sulit untuk memberantas korupsi di Indonesia. Rendahnya gaji dan tidak adanya penegakan hukum yang efektif adalah salah satu penyebab korupsi meraja lela. Pelayan public rendahan melakukan korupsi demi kelangsungan hidup, pejabat tinggi melakukan korupsi untuk menumpuk kekayaan karena takut miskin ketika nanti sudah tidak berkuasa lagi. Di bawah kondisi semacam itu, saling melindungi menjadi 'norma' yang harus ditegakkan bersama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana tidak efektifnya kotak suara pengaduan yang bersifat anonym terkait dengan korupsi. Tidak satu pun orang yang akan menindaklanjuti pengaduan itu, jika dengan menindaklanjuti pengaduan berarti 'bunuh diri bersama'.

Apa yang kemudian harus dilakukan? Mereformasi dan meningkatkan pelayanan pemerintahan, termasuk perbaikan kesejahteraan pegawai adalah bagus tetapi tidak cukup. Kebijakan pemberantasan korupsi seharusnya mengadopsi pendekatan *reward and punishment*. Dari sudut pandang praktis, adalah tidak efektif jika memperketat hukuman tanpa diikuti usaha peningkatan gaji atau pendapatan pegawai pelayan public, khususnya bagi mreke yang berpenghasilan rendah. Level hukuman seyogyanya juga seiring dengan level pegawai itu. Pegawai negeri atau pejabat tingkat tinggi harus menerima hukuman yang lebih tinggi jika terbukti korupsi, demikian juga kalau melakukan ke3salahan dalam menjalankan tugasnya. di sini, pendekatan religious bisa ditambahkan, sebagaimana diusukan NU misalnya, yaitu tidak perlu disholatkan untuk jenazah koruptor. Hukuman atau resiko korupsi harus melebihi keuntungan yang didapat dari korupsi jika menginginkan korupsi dapat berkurang. Singkatnya, pesan yang jelas tentang dampak korupsi perlu ditekankan sehingga orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi.

Karena korupsi sudah demikian parahnya di negeri iini, usaha-usaha anti korupsi yang efektif harus diupayakan. Pemerintah harus memulainya dengan mengimplementasikan strategi pada wilayah skala kecil, pada lingkup kecamatan, misalnya, sebelum bergerak ke lingkup yang lebih besar, kabupaten atau propinsi. Perlu diingat bahwa memeberantas korupsi bukan merupakan pekerjaan yang akan selesai semalam. Ini merupakan sebuah usaha yang menuntut kesabaran, keteguhan, dan dukungan dari semua pihak dan komprehensif.

Secara komprehensif, *the Economic Development Institute (EDI)* dari Bank Dunia, misalnya telah memperkenalkan konsep yang disebut '*the pillars of integrity*', yang melibatkan delapan lembaga untuk memberantas KKN, khususnya korupsi. Kedelapan lembaga ini meliputi: (1) *lembaga eksekutif*; (2) *lembaga parlemen*; (3) *lembaga kehakiman*; (4) *lembaga-lembaga pengawas*; (5) *media*; (6) *sector swasta*; (7) *masyarakat sipil*; dan (8) *lembaga-lembaga penegk hokum lainnya* (Langseth, 1997).

Penutup

Dalam menjelaskan fenomena perilaku menyimpang, para sosiolog cenderung menekankan pada penggunaan salah satu perspektif dan cenderung mengabaikan perspektif lainnya. Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang memadai atau komprehensif dan dalam rangka turut serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang efektif terkait dengan korupsi sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, para pakar maupun masyarakat awam hendaknya berpandangan komprehensif. Penekanan pada salah satu teori dan cenderung mengabaikan teori yang lain akan membuat kita berpandangan sempit dan berakibat pada pengambilan keputusan yang bersifat parsial yang efektivitasnya diragukan. Teori-teori sosiologi, baik klasik maupun kontemporer telah berusaha memaparkan dengan cukup memadai, meskipun tidak mungkin bersifat tuntas, mengingat begitu kompleksnya hakikat perilaku menyimpang, termasuk korupsi ini.

Daftar Pustaka

Bank Dunia, 2003, *Combating corruption in Indonesia, enhancing accountability for development* (report No. 27246-IND, November, 12, 2003).

Barlev, N., 2005, "An Economic perspective of corruption", dimuat *The Jakarta Post*, Rabu, April, 6, 2005.

Brinkerhoff, D.B., & White, L.K., 1983, *Essentials of Sociology*, New York: West Publishing Company.

Cohen, B.j. 1992, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.

Goode, E., 1984, *Deviant behaviour, second edn.* New Jersey: Prentice Hall.

Klitgarard, R. 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Langseth, P., Staphenurst, R., & Pope, R., 1997, "The role of National integrity System in Fighting Corruption", *EDI Working Paper*, New York: The economic development Institute of world Bank.

Scheffer, r.t., 1989, *Sociology*, New York: Mc Graw-Hill, Inc.

Schur, E.M. 1979, *Interpreting deviance, a sociological introduction.* New York: Harper Raw Publishers.